

BAB II

KEBIJAKAN KENDARAAN LISTRIK (EV) DI INDONESIA DAN AGENDA ASEAN UNTUK MENGEMBANGKAN EKOSISTEM KENDARAAN LISTRIK

Bab ini akan menjelaskan terkait kebijakan kendaraan listrik (EV) di Indonesia dan agenda ASEAN untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Bab ini akan terbagi menjadi tiga subbab. Pertama, kebijakan kendaraan listrik (EV) pada pemerintahan Joko Widodo. Kedua, terkait kerjasama produksi EV antara Indonesia, Korea Selatan, Australia. Lebih lanjut, subbab ketiga akan membahas bagaimana pernyataan ASEAN Plus Three terkait pengembangan dan produksi EV.

1.1. Kebijakan Kendaraan Listrik (EV) pada Pemerintahan Joko Widodo

Isu lingkungan semakin menjadi fokus banyak negara, karena dampak dari isu ini semakin nyata dan dirasakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Tidak hanya negara-negara maju yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan, tetapi juga negara berkembang yang pada awalnya tidak menganggap isu ini sebagai isu penting. Seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya menjaga lingkungan, organisasi-organisasi regional mulai melibatkan isu lingkungan dan perlindungan sumber daya alam dalam agenda utama mereka. Salah satu organisasi yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam hal ini adalah ASEAN, yang mengeluarkan berbagai kebijakan dan inisiatif, seperti ASCC Blueprint 2025, Southeast Asia Programme on Marine Plastics (SEA-MAP), ASEAN Joint

Statement on Biodiversity untuk CBD-COP 14, dan ASEAN Plus Three Leaders Statements mengenai Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik (Association of Southeast Asian Nations, 2020).

Negara-negara anggota ASEAN juga telah banyak meratifikasi konvensi internasional di bidang lingkungan, seperti Paris Agreement dan Convention on Biological Diversity, sebagai langkah konkret dalam upaya melindungi lingkungan dan memitigasi dampak perubahan iklim. Langkah-langkah ini mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya keberlanjutan dan perlindungan sumber daya alam. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia telah mengambil berbagai langkah dan membuat terobosan baru untuk mengatasi isu lingkungan yang semakin mendesak. Salah satu inisiatif yang paling diapresiasi oleh negara-negara lain adalah kebijakan Indonesia dalam bidang kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV). Kebijakan ini diimplementasikan secara signifikan selama periode kedua pemerintahan Joko Widodo, dari tahun 2019 hingga 2024. Berbagai kebijakan yang mendukung adopsi kendaraan listrik telah dikeluarkan, termasuk kebijakan pengurangan pajak, penyesuaian pajak, dan pembebasan jalan raya untuk menarik pengguna baru mobil listrik (Khairani, 2022).

Ikatan Motor Indonesia (IMI) menyebut Joko Widodo sebagai "Bapak Otomotif Indonesia" sebagai pengakuan atas upayanya untuk membuat regulasi yang mendukung industri otomotif, terutama dalam hal pengembangan kendaraan listrik. Ketua IMI dari seluruh Indonesia menyetujui deklarasi ini, setuju untuk memberikan penghargaan tertinggi kepada Presiden Jokowi atas upayanya untuk meningkatkan minat dan perhatian dunia terhadap industri otomotif Indonesia

(Kurniawan, 2023). Peraturan Presiden (PERPRES) No. 55 Tahun 2019, yang ditetapkan pada 8 Agustus 2019, merupakan salah satu peraturan penting yang berkaitan dengan kendaraan listrik. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2019), kebijakan ini mengubah PERPRES No. 79 Tahun 2023, yang mengatur Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Dalam 37 pasal, undang-undang tersebut membahas kendaraan listrik secara umum. Pasal-pasal tersebut menjelaskan apa itu motor listrik, baterai, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum.

Amandemen dalam PERPRES No. 79 Tahun 2023 memberikan penjelasan lebih rinci mengenai tarif impor mobil listrik, sehingga memberikan dasar hukum yang jelas terkait penggunaan dan pengoperasian kendaraan listrik di Indonesia. Kebijakan ini sangat penting dalam mendukung industri kendaraan listrik dan mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan di masyarakat. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 tahun 2020 adalah kebijakan tambahan yang mendukung inisiatif kendaraan listrik. Peraturan ini mengatur infrastruktur yang digunakan untuk mengisi kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan disahkan sebagai undang-undang pada 7 Agustus 2020 setelah ditetapkan pada 4 Agustus 2020 (JDIH BPK, 2020). Infrastruktur pengisian daya untuk mobil listrik yang termasuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan ini. Untuk memastikan

bahwa infrastruktur yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan kendaraan listrik, pengaturan ini sangat penting.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 juga mendukung kemajuan kendaraan listrik. Peraturan ini mengatur perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020, yang akhirnya menjadi undang-undang pada tanggal 31 Januari 2020 (JDIH BPK, 2020). Peraturan ini menetapkan bahwa pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk kendaraan listrik berbasis baterai adalah 30% dari pengenaan dasar PKB, dan pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang paling tinggi adalah untuk kendaraan bermotor (Prasetya, 2024). Permen Perhubungan No. 65 Tahun 2020, yang sangat penting, mengatur transformasi sepeda motor biasa menjadi tenaga listrik. Peraturan ini mendefinisikan bengkel konversi dan prosedur yang diperlukan untuk mengubah motor konvensional menjadi motor listrik dengan mengganti komponen seperti baterai dan sistem manajemen baterai (Prasetya, 2024). Hal ini memungkinkan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik daripada kendaraan berbahan bakar fosil, yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan efek negatif lainnya terhadap lingkungan.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022, yang ditetapkan pada 11 Maret 2022 (JDIH BPK, 2022), mengatur spesifikasi, peta jalan pengembangan, dan cara menghitung nilai tingkat komponen dalam negeri untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa pengembangan kendaraan listrik di Indonesia dapat mencapai Tingkat Perkembangan Kendaraan Listrik Nasional (EV) pada Tingkat Tujuan.

Memberikan program bantuan masyarakat adalah tindakan tambahan yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong orang untuk menggunakan kendaraan listrik. Pada Maret 2023, pemerintah mengeluarkan program bantuan sebesar 7 juta rupiah untuk motor listrik baru dan motor konversi dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 40% (Hasiman, 2023). Semua orang di Indonesia yang ingin beralih dari mobil berbasis fosil ke mobil berbasis baterai dapat memanfaatkan bantuan ini. Selain itu, pemerintah memberikan insentif kepada mobil roda empat dengan mengurangi PPN sebesar 10% dari sebelumnya, sehingga orang yang menggunakan EV hanya perlu membayar PPN sebesar 1% (Hajar, 2023).

Diharapkan bahwa kebijakan dan program-program ini akan mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik, yang pada akhirnya akan mengurangi polusi udara dan efek buruk lainnya dari kendaraan berbahan bakar fosil. Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan untuk mendorong industri EV untuk masuk ke Indonesia, selain mengatur penggunaan EV di negara itu. Perpres 79/2023 menetapkan ketentuan ini dan memberikan insentif bea masuk untuk importasi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) yang masih utuh atau sepenuhnya dibangun (CBU). Untuk memaksimalkan produksi mobil listrik di Indonesia, insentif ini hanya berlaku bagi produsen yang akan atau sudah berinvestasi di fasilitas manufaktur di negara ini. Biaya insentif ditanggung oleh pemerintah (Andrianto, 2023; Kurniawan, 2023). Kebijakan ini sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia untuk menjadikan negara sebagai pusat manufaktur kendaraan. Dengan mendorong investasi dalam kendaraan listrik, negara ini

diharapkan dapat menjadi pemain utama dalam industri mobil di seluruh dunia, terutama dalam produksi kendaraan yang ramah lingkungan.

Kerja sama global sangat penting untuk mencapai tujuan ambisius Indonesia pada tahun 2030. Indonesia telah bekerja sama dengan negara-negara yang lebih maju dalam menerapkan kendaraan listrik dan negara-negara yang dapat memberikan keuntungan besar baginya. Korea Selatan, Vietnam, dan Australia adalah beberapa negara yang telah bekerja sama dengan Indonesia untuk membuat kendaraan listrik lebih mudah diakses.

Sebagai salah satu negara pertama yang mengembangkan kendaraan listrik, Indonesia dapat menggunakan pengalaman dan teknologi Korea Selatan. Indonesia dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi saat ini untuk mempercepat pengembangan industri EV-nya melalui kerja sama ini. Selain itu, Vietnam, yang merupakan anggota ASEAN, dapat menjadi partner strategis dalam hal pengembangan sektor kendaraan yang ramah lingkungan. Australia, yang dikenal dengan kebijakan pro-lingkungan dan inovasi teknologi, juga dapat menjadi mitra yang berharga bagi Indonesia dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Kerja sama ini tidak hanya akan membantu Indonesia dalam mempercepat transisi ke kendaraan listrik, tetapi juga dalam mengembangkan infrastruktur pendukung yang diperlukan, seperti stasiun pengisian listrik dan sistem manajemen energi.

Dalam menghadapi tantangan isu lingkungan yang semakin kompleks, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk beradaptasi dan berinovasi, terutama dalam pengembangan kendaraan listrik. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin industri kendaraan listrik di kawasan ASEAN, dengan

dukungan dari kerja sama internasional dan implementasi berbagai kebijakan dan program insentif. Namun, masih banyak masalah yang perlu ditangani, terutama berkaitan dengan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan dana yang diperlukan untuk mendukung transisi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, pemerintah, industri, dan masyarakat harus bekerja sama. Indonesia memiliki kemampuan untuk mewujudkan impian untuk menjadi pusat manufaktur kendaraan listrik dan membantu menjaga kelestarian lingkungan di seluruh dunia dengan tindakan yang tepat. Keberhasilan Indonesia dalam mengatasi isu lingkungan dan mengembangkan industri kendaraan listrik tidak hanya akan membawa manfaat bagi negara, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya global dalam menghadapi perubahan iklim. Upaya ini dilihat dengan berbagai bentuk kerjasama antar negara.

Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan kendaraan listrik dari berbagai negara, termasuk China, Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, komitmen dan langkah nyata pemerintah terhadap pengembangan kendaraan listrik semakin terlihat. Salah satu contohnya adalah investasi PT Industri Baterai Indonesia (Indonesia Battery Corporation), yang merupakan gabungan empat perusahaan lokal bersama Hyundai Motor Group dan LG Energy Solutions dari Korea Selatan. Pada tahun 2021, mereka memulai pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, dengan nilai investasi mencapai Rp 15,9 triliun (Daniel, 2021).

Selain itu, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Tesla. Tesla menggunakan baterai LiFePO₄ yang diproduksi oleh Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), dengan tipe baterai Nickel, Cobalt, Aluminium (NCA), dan Nickel, Cobalt, Mangan (NCM). Tesla memiliki peran signifikan dalam memenuhi kebutuhan baterai kendaraan listrik untuk mendukung target 2030. Perusahaan asal Jepang, seperti Toyota, juga turut meningkatkan investasinya sebesar USD 2 miliar, sementara Honda memindahkan pabriknya dari India ke Indonesia dan menambahkan investasi sebesar Rp 5,2 triliun hingga tahun 2024.

Di sisi lain, perusahaan asal Amerika Serikat, Tesla, telah menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) terkait rencana investasi kendaraan listrik di Indonesia. Sementara itu, perusahaan asal China, CATL, berencana membangun pabrik baterai dengan nilai investasi USD 5,2 miliar yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2024. Jerman juga turut ambil bagian melalui perusahaan Badische Anilin-und Soda-Fabrik (BASF), yang tengah menjajaki kontrak kerja sama dengan BKPM untuk investasi di sektor kendaraan listrik (KNIC, 2021).

1.2. Kerja Sama Indonesia dalam Mengembangkan Ekosistem EV

1.2.1. Kerja Sama Infrastruktur EV Indonesia – Korea Selatan

Indonesia terus memperkuat kerja sama internasional dalam upaya mengembangkan kendaraan listrik (EV) dengan berbagai negara, terutama Korea Selatan. Presiden Joko Widodo dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol

menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) pada bulan September 2023 yang berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk produksi, pengisian daya, dan pemeliharaan kendaraan listrik. Selain itu, proyek penelitian dan pengembangan ini mencakup pengembangan teknologi untuk berbagai jenis kendaraan yang menggunakan listrik sebagai sumber daya utama, termasuk kendaraan listrik berbaterai (*Battery Electric Vehicle*, BEV) dan kendaraan listrik berbahan bakar sel (*Fuel Cell Electric Vehicle*, FCEV) (Korea JoongAng Daily, 2023). Salah satu inisiatif yang telah dijalankan dalam kerangka kerja sama ini adalah Proyek Grand Package Konsorsium LG.

Selain itu, kolaborasi antara Indonesia dan Korea Selatan juga mencakup pengembangan ekosistem kendaraan listrik untuk transportasi umum. Salah satu proyek yang sedang dalam fase percobaan adalah penerapan bus listrik di Bali, yang direncanakan untuk diimplementasikan hingga Desember 2027 dengan pendanaan yang sepenuhnya disediakan oleh Global Green Growth Institute (GGGI) (Indonesia Business Post, 2023). Di Indonesia, kemajuan kendaraan listrik menunjukkan komitmen dan tindakan nyata dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Salah satu buktinya adalah kerja sama investasi PT. Industri Baterai Indonesia/Indonesia Battery Cooperation, yang merupakan gabungan dari empat perusahaan lokal dan Korea Selatan, Hyundai Motor Group dan LG Energy Solutions. Mereka memulai pembangunan pabrik baterai mobil listrik di Karawang, Jawa Barat, pada tahun 2021 melalui joint venture senilai Rp 15,9 triliun (Daniel, 2021).

Di tahun berikutnya, Indonesia kembali bekerja sama dengan LG Energy Solution dalam proyek kedua yang berfokus pada pengembangan baterai mobil listrik terintegrasi, yang mencakup produksi paket baterai untuk kendaraan listrik dan proses penambangan nikel. Menurut V. N. Setiawan (2022), proyek ini diharapkan dapat menyerap hingga 20.000 orang, dengan investasi sebesar Rp 142 triliun. Bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan mobil listrik di Indonesia, terutama dengan adanya pabrik Hyundai di Deltamas, Cikarang, Jawa Barat, kedua proyek ini. Sejak tahun 2019, rencana proyek ini telah direncanakan, dan MoU untuk pembangunan pabrik dan infrastruktur telah disetujui pada akhir tahun 2021 (CNN Indonesia, 2022a). Dengan investasi Korea Selatan meningkat di Indonesia, Indonesia mendapat manfaat dari kemajuan teknologi dan ekonomi. Perjanjian IK-CEPA memungkinkan kerja sama baru karena akses pasar yang lebih baik, fasilitas perdagangan dan investasi, dan ekonomi yang terus berintegrasi untuk mendorong inovasi dalam industri kendaraan listrik.

Karena Indonesia adalah salah satu penghasil nikel terbesar di dunia, memenuhi tanggung jawab terkait bahan baku baterai, terutama nikel, mungkin sulit. Indonesia dan Korea Selatan dapat bekerja sama untuk menghasilkan setengah dari baterai mobil listrik dunia, tentu saja dengan dukungan Korea Selatan untuk menyediakan pasokan domestik dan internasional (Harinowo, Cyrillus, dan Khaidir, 2021). Kemajuan teknologi dan pertumbuhan industri yang didorong oleh investasi asing dan sumber daya alam yang melimpah Indonesia memungkinkan kerjasama ini untuk mengukir posisi penting di pasar kendaraan listrik global.

1.2.2. MoU Indonesia – Australia yang Berdampak pada Pemanfaatan SDA

Indonesia yang Berkelanjutan dan Bertanggung Jawab

Kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik (EV) merupakan langkah strategis yang penting, tercermin melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 2022. MoU ini menekankan enam aspek krusial yang menjadi fondasi kolaborasi kedua negara: (1) mengurangi ketergantungan dan mendorong diversifikasi, (2) pemetaan rantai pasokan EV, (3) kerja sama dalam metode pemrosesan dan manufaktur EV baru, (4) dukungan terhadap rantai pasokan mineral penting di Indonesia, (5) mengurangi tantangan dan memperluas basis investor, serta (6) meningkatkan peringkat *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan penunjang ekspor (Interesse, 2023). Langkah ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk menciptakan sinergi yang saling menguntungkan, di mana Indonesia berusaha memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki, khususnya cadangan nikel yang melimpah, sambil mengurangi ketergantungan pada investasi dan sumber daya dari Tiongkok. Dalam konteks ini, Australia juga berusaha memperkuat produksi baterai, sehingga ambisi kedua negara dapat saling melengkapi.

Dampak dari MoU ini terhadap industri kendaraan listrik di Indonesia sangat signifikan. Salah satu hasil positif dari kerjasama ini adalah peningkatan daya saing Indonesia di kancah global sebagai produsen nikel, bahan baku utama dalam produksi kendaraan listrik. Indonesia berusaha mempertahankan posisinya sebagai penghasil nikel terbesar di dunia dengan memanfaatkan investasi dari perusahaan besar di industri EV. Hal ini sangat strategis mengingat peningkatan

permintaan kendaraan listrik dan baterai di seluruh dunia. Salah satu daya tarik utama bagi investor asing yang ingin berkontribusi pada pengembangan industri ini adalah cadangan nikel Indonesia, yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

Selain aspek ekonomi, MoU ini juga menegaskan pentingnya praktik sumber daya yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta mendukung visi Indonesia untuk menciptakan industri otomotif yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya mineral harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan agar dampak lingkungan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi modern dalam proses pengolahan dan produksi nikel menjadi hal yang sangat diperlukan. Dengan pendekatan yang berbasis pada keberlanjutan, Indonesia dapat menarik perhatian pasar internasional yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam rantai pasokan.

Adanya Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) meningkatkan kerja sama bilateral. Perjanjian ini dimulai pada 5 Juli 2020 dengan tujuan membangun kolaborasi yang menguntungkan dalam berbagai industri, seperti investasi, barang, dan jasa. Sebelum perjanjian ini, hubungan bilateral kedua negara telah diperkuat melalui Perjanjian Kerja Sama Tuntas pada tahun 2005. Proses ratifikasi IA-CEPA menunjukkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang lebih luas. Diproyeksikan pertumbuhan GNP Indonesia sebesar 0,23% pada tahun 2030 (Fahri, 2020).

IA-CEPA juga menciptakan kerangka kerja sama baru yang menggabungkan berbagai aspek bisnis, komunitas, dan individu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bilateral. Dalam konteks ini, perjanjian ini lebih dari sekadar

kesepakatan perdagangan biasa; IA-CEPA berupaya membangun kemitraan yang lebih dalam antara Indonesia dan Australia, serta memanfaatkan potensi masing-masing negara untuk menciptakan kekuatan ekonomi baru di kawasan tersebut. Dengan menjalin kerjasama di bidang perdagangan barang, investasi, dan jasa, kedua negara dapat saling melengkapi untuk menciptakan model ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari implementasi IA-CEPA, industri otomotif Indonesia menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat meraih manfaat terbesar. Indonesia dikenal dengan kapasitas manufaktur otomotif yang kuat, di mana sejumlah raksasa global seperti Toyota, Hyundai, Nissan, dan Honda memilih Indonesia sebagai basis produksi mereka. Ketika sektor otomotif bekerja sama, diharapkan ekspornya ke Australia meningkat, yang merupakan bagian penting dari diversifikasi pasar dan peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain itu, sektor ini memainkan peran yang signifikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Dengan adanya perjanjian IA-CEPA, akses pasar yang lebih baik dan kesempatan untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih erat dengan Australia akan memperkuat posisi Indonesia di pasar otomotif internasional. Kesempatan untuk memperluas pasar ekspor juga menjadi salah satu fokus utama dalam perjanjian ini, yang memungkinkan produk-produk otomotif Indonesia dapat bersaing di pasar Australia dan negara-negara sekitarnya. Hal ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan industri mobil yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia dalam jangka panjang. Pemetaan rantai pasokan EV di Australia adalah langkah penting menuju ekosistem kendaraan listrik yang sehat.

Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti fasilitas pengolahan nikel dan produksi baterai, sangat penting untuk memastikan kelancaran proses produksi kendaraan listrik di Indonesia. Dengan memanfaatkan cadangan nikel yang melimpah, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat produksi baterai di kawasan ini, sekaligus memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional. Kerjasama ini harus melibatkan praktik-praktik keberlanjutan yang bertanggung jawab, mengingat pentingnya menjaga lingkungan hidup dan mematuhi standar ESG yang semakin menjadi perhatian di pasar global.

Indonesia harus terus berinovasi dan menggunakan teknologi terbaru dalam proses produksi untuk memperkuat kerja sama bilateral dan mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Selain membantu mencapai tujuan lingkungan yang berkelanjutan, hal ini akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik global, dengan dukungan dari Australia dan mitra internasional lainnya.

Oleh karena itu, MoU dengan Australia dan IA-CEPA memberikan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk mendorong industri EV dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dengan melakukan hal ini, Indonesia akan menghasilkan industri mobil yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, yang akan menguntungkan ekonomi dan masyarakat. Melalui kerja sama yang erat ini, Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih baik

dan membantu pertumbuhan ekonomi global menjadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

1.2.3. Kontribusi Vietnam dalam Produksi EV di Indonesia

Kerja sama antara Indonesia dan Vietnam dalam pengembangan sektor kendaraan listrik (EV) serta industri hijau dan ketahanan pangan telah menunjukkan potensi yang signifikan dan menjanjikan. Upaya ini diinisiasi oleh Menteri Perindustrian Indonesia, Agus Gumiwang, yang baru-baru ini mengundang Vietnam untuk berkolaborasi lebih lanjut dalam bidang ini. Selain memiliki nilai bagi kedua negara, kerjasama ini akan berdampak luas pada perkembangan industri mobil di Asia Tenggara. Memanfaatkan potensi industri hijau menjadi semakin penting seiring dengan tren global menuju keberlanjutan. Indonesia dan Vietnam dapat bekerja sama untuk membuat solusi yang memenuhi kebutuhan pasar domestik dan mendukung visi ASEAN yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hubungan antara Indonesia dan Vietnam menjadi lebih kuat setelah VinFast Auto Ltd., salah satu perusahaan otomotif terkemuka di Vietnam, berkomitmen untuk membangun pabrik mobil listrik di Indonesia dengan investasi sekitar 1,2 miliar dollar (Yogatama, 2024). Komitmen ini sejalan dengan target ambisius Presiden Joko Widodo, yang menetapkan produksi EV di Indonesia sebanyak 600 ribu unit pada tahun 2030. Investasi dari VinFast menjadi langkah penting dalam mencapai target tersebut dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan industri otomotif Indonesia yang berkelanjutan.

VinFast tidak hanya berfokus pada proses produksi EV, tetapi juga berkolaborasi dengan perusahaan transportasi dan jasa teknologi di Indonesia sebagai bagian dari rencana ekspansi EV yang lebih luas. Dalam konteks ini, VinFast, mirip dengan perusahaan-perusahaan dari Korea Selatan, menunjukkan ketertarikan untuk berkontribusi dalam implementasi bus listrik di Indonesia, dengan komitmen untuk melakukan investasi besar (Yogatama, 2024). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah mendorong industri kendaraan listrik dengan memberikan insentif seperti fasilitas pajak, keringanan pajak, dan insentif untuk pajak penjualan barang mewah. Tujuan kebijakan ini tidak hanya untuk menarik investasi asing tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri hijau di Indonesia. Namun, meskipun ada banyak peluang, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Vietnam tidak selalu berjalan mulus. Karena banyak produk mobil Indonesia diekspor ke Vietnam, Indonesia melihat Vietnam sebagai pasar strategis. Secara ekonomi, Vietnam memiliki prospek yang bagus untuk berkembang dalam industri otomotif, serta berkontribusi pada PDB Indonesia. Sebaliknya, hubungan bilateral yang telah terjalin sejak tahun 1955 telah terganggu karena aturan impor Vietnam yang ketat. Eksportir Indonesia menghadapi masalah besar karena kebijakan baru pemerintah Vietnam tahun 2018 yang mengharuskan mobil yang diimpor menjalani pemeriksaan kelayakan.

Yolanda (2018) mengatakan bahwa karena kebijakan, mobil buatan Indonesia harus ditahan di pelabuhan Vietnam untuk menjalani tes kelayakan. Ini mengakibatkan biaya tambahan. Ini mengurangi pemasukan Indonesia secara signifikan, dan pemerintah harus aktif mencari cara untuk mengembalikan ekspor

ke Vietnam. Sangat penting untuk mengatasi masalah ini mengingat banyak industri mobil Indonesia bergantung pada pasar Asia Tenggara, terutama Vietnam. Presiden Joko Widodo menekankan betapa pentingnya meningkatkan kerja sama dalam perdagangan dan berjanji untuk mengatasi hambatan yang ada.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, hambatan ekspor mobil ke Vietnam semakin menonjol, terutama antara tahun 2017 dan 2019. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo memberikan dukungan kepada pelaku bisnis untuk meningkatkan penjualan di sektor otomotif melalui kebijakan dan insentif yang bertujuan mempermudah investasi, ekspor, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Menurut Kemenperin (2019), industri otomotif dianggap sebagai pionir dari berbagai sektor lain dan berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Perindustrian terus mendorong usaha, investasi, dan transfer teknologi.

Indonesia menghadapi masalah besar dengan pengeksportan mobil ke Vietnam pada awal 2018. Karena peraturan baru, yang diatur dalam Decree No. 116/2017 dan Circular No. 03/2018, yang memerlukan sertifikasi *Vehicle Type Approval* (VTA) untuk mobil tipe lengkap dibangun (CBU), masalah ini muncul. Kebijakan ini dapat membahayakan industri mobil Indonesia.

Perdana Menteri Vietnam berjanji untuk menyelesaikan masalah dalam waktu dua bulan dan mengatur pertemuan lanjutan di Vietnam (CNN, 2018). Ini menunjukkan betapa pentingnya diplomasi untuk mempertahankan hubungan perdagangan yang baik antara dua negara. Dengan penyelesaian masalah regulasi ini, industri otomotif Indonesia dan Vietnam akan memperoleh produk berkualitas tinggi dari Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keluhan kepada

pemerintah Vietnam karena aturan yang menghambat ekspor mobil dari Indonesia. Ia menekankan bahwa Vietnam telah menerapkan regulasi yang menghalangi transaksi mobil yang diimpor dari Indonesia, dan hal ini harus diselesaikan untuk menjaga hubungan perdagangan tetap lancar. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk memastikan dukungan yang berkelanjutan terhadap industri otomotif agar dapat terus bersaing di pasar global (Daud, 2018).

Ke depan, kerja sama dalam industri mobil antara Indonesia dan Vietnam harus dipertahankan dan diperkuat melalui berbagai inisiatif yang mendukung keberlanjutan dan inovasi. Salah satunya adalah peningkatan kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi EV, sehingga kedua negara dapat saling berbagi pengetahuan dan sumber daya. Selain itu, pemerintah kedua negara perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang ada, untuk memastikan bahwa regulasi tidak menjadi penghalang bagi perkembangan industri otomotif, melainkan menjadi pendorong pertumbuhan. Indonesia dan Vietnam memiliki peluang besar untuk menjadi pusat produksi EV di Asia Tenggara. Kedua negara dapat mengambil langkah besar menuju transisi energi yang berkelanjutan dengan dukungan investasi dari VinFast dan perusahaan lainnya, serta upaya pemerintah untuk menciptakan iklim bisnis yang aman. Ini akan membantu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan mitigasi perubahan iklim selain memperkuat posisi Vietnam dan Indonesia di pasar mobil dunia.

Secara keseluruhan, kerja sama dalam industri otomotif antara Indonesia dan Vietnam adalah langkah strategis yang akan menguntungkan kedua negara dan berdampak besar pada perekonomian dan lingkungan Asia Tenggara. Dengan

memperkuat kerja sama ini dan mengatasi masalah yang ada, Indonesia dan Vietnam dapat membangun masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

1.3. Pernyataan ASEAN Plus Three Leaders' Statement Terkait Pengembangan Produksi Kendaraan Listrik

Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk berperan aktif dalam kerjasama regional, khususnya di dalam organisasi ASEAN. Di tengah upayanya untuk mengalihkan ketergantungan pada kendaraan berbasis fosil menuju kendaraan listrik (EV), langkah ini tidak hanya merupakan strategi untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga merupakan upaya Indonesia untuk berkontribusi dalam integrasi ekosistem mobil listrik di kawasan ASEAN. Dalam beberapa tahun terakhir, isu pemansan global dan perubahan iklim telah menjadi perhatian utama negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan-pertemuan seperti ASEAN Plus Three Leaders yang berlangsung di Jakarta pada September 2023 menjadi momen krusial untuk menyusun rencana konkret menghadapi tantangan lingkungan ini.

ASEAN Plus Three Leaders' Statement on Developing of Electric Vehicle Ecosystem adalah salah satu hasil penting dari pertemuan tersebut. Pernyataan ini memberi negara-negara anggota ASEAN panduan untuk menerapkan mobil listrik sebagai solusi untuk masalah lingkungan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ASEAN semakin serius dalam menangani masalah dunia internasional. Potensi untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan semakin terbuka lebar ketika negara-negara anggota bekerja sama.

Sembilan dari sebelas negara anggota ASEAN menghadiri pertemuan tersebut, yang merupakan momen penting dalam KTT ASEAN yang diadakan setiap dua tahun. Perwakilan dari negara-negara mitra seperti Cina, Jepang, dan Republik Korea serta anggota ASEAN berpartisipasi. Dalam pernyataan tersebut, para pemimpin ASEAN Plus Three mengulangi komitmen mereka terhadap Perjanjian Paris dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Mereka menekankan bahwa agenda transportasi berkelanjutan, yang dapat disesuaikan dengan keadaan setiap negara, harus mencakup pengurangan emisi di sektor ketenagalistrikan dan transisi menuju emisi rendah karbon dan nol.

Pentingnya mineral kritis dalam transisi energi ramah lingkungan juga menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. Negara anggota ASEAN melihat bahwa untuk mendukung pengembangan ekosistem EV, perlu ada rantai pasokan yang dapat diandalkan. Tiongkok, sebagai salah satu penguasa dalam penambangan kobalt dan litium, sangat menekankan perlunya membangun komunitas yang lebih erat antara Tiongkok dan ASEAN dalam konteks industri kendaraan energi baru. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama dalam pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan akan sangat penting dalam menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang efektif dan efisien.

Pada KTT ASEAN-Amerika Serikat ke-11, Wakil Presiden Kamala Harris bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas, seperti pelaksanaan Kemitraan Transisi Energi yang Adil senilai US\$20 miliar. Untuk mendukung transisi energi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kolaborasi ini bertujuan untuk memobilisasi dana

besar dari sektor publik dan swasta. Ini adalah tindakan strategis yang menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar berkomitmen untuk mewujudkan masa depan yang lebih lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam pembahasan ini, Departemen Perhubungan AS juga memimpin Dialog Pejabat Senior AS-ASEAN mengenai transportasi untuk memperdalam kerja sama di bidang infrastruktur transportasi dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan. Kesepakatan yang dicapai mencakup produksi kendaraan listrik sesuai dengan standar internasional, mencerminkan keseriusan ASEAN dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam merumuskan kebijakan terkait EV, baik di dalam negeri maupun dalam konteks perjanjian internasional.

Dalam pidato pembukaannya di KTT ASEAN Plus Three (APT) ke-26, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ASEAN Plus Three akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Terlepas dari kolaborasi yang telah dilakukan, wilayah tersebut tetap tangguh. Pertemuan ini juga menekankan betapa pentingnya pengembangan ekonomi hijau, termasuk infrastruktur hijau, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekosistem kendaraan listrik adalah kerja sama utama yang dibahas. Ini mencakup investasi, transfer teknologi, dan pertukaran praktik terbaik antarnegara anggota.

Deklarasi yang diadopsi oleh ASEAN mengucapkan terima kasih kepada Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan atas dukungan mereka untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Diharapkan dukungan ini dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi dan transisi energi yang berkelanjutan. Diharapkan negara-negara anggota ASEAN dapat bekerja sama untuk mengembangkan teknologi baru yang memungkinkan pembuatan kendaraan listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. KTT ke-26 APT juga menekankan betapa pentingnya bekerja sama untuk menangani masalah di masa depan seperti krisis kesehatan dan ketidakpastian geopolitik di wilayah tersebut. Negara-negara anggota mencapai kesepakatan untuk membangun infrastruktur dan sistem logistik yang lebih tangguh dan mandiri sebagai akibat dari disrupsi rantai pasokan global. Konsensus ini didasarkan pada pengalaman bersama selama pandemi COVID-19 dan krisis lainnya, yang telah menunjukkan bahwa kita harus siap untuk menghadapi tantangan global.

Namun, ada beberapa masalah yang perlu diatasi selama proses menuju kendaraan listrik. Investasi yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur pendukung, seperti stasiun pengisian daya, merupakan salah satu tantangan terbesar. Untuk mengembangkan 4 juta unit infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik, analisis menunjukkan bahwa Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya harus menginvestasikan hampir USD 419 miliar hingga tahun 2050. Jumlah ini tidak mencakup infrastruktur terkait lainnya yang diperlukan untuk mendukung secara menyeluruh ekosistem kendaraan listrik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada pasar kendaraan listrik yang sangat besar di kawasan ASEAN, pemerintah dan pemangku kepentingan harus memprioritaskan masalah pendanaan dan infrastruktur. Untuk mendorong investasi dan pengembangan infrastruktur yang diperlukan, sektor publik dan swasta harus bekerja sama dengan baik. ASEAN Plus Three (APT) adalah forum penting yang

melibatkan ASEAN dan tiga negara mitra: Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. APT memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Diharapkan bahwa negara-negara ini akan bekerja sama untuk meningkatkan nilai dan meningkatkan daya saing di industri EV di seluruh dunia.

Salah satu elemen kunci dalam kerjasama ini adalah harmonisasi standar dan regulasi. Setiap negara anggota memiliki kebijakan dan regulasi yang berbeda terkait kendaraan listrik, sehingga perlu ada upaya untuk menyelaraskan kebijakan tersebut agar dapat menciptakan pasar yang lebih terintegrasi. Hal ini juga mencakup pertukaran informasi dan teknologi yang diperlukan untuk mendorong pengembangan kendaraan listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. ASEAN juga baru-baru ini mengembangkan Strategi ASEAN untuk Netralitas Karbon, yang memberikan pendekatan terkoordinasi dan komplementer untuk memanfaatkan manfaat yang mungkin mencapai nilai tambah PDB sebesar USD 5,3 triliun pada tahun 2050 dengan mengadopsi netralitas karbon di kawasan ini. Dengan memanfaatkan kekuatan ASEAN dan komplementaritas regional, menciptakan rantai nilai kendaraan listrik pan-ASEAN dengan mengumpulkan sumber daya, berbagi biaya, dan mengoordinasikan proses produksi menjadi prioritas melalui pemanfaatan sumber daya dan kemampuan manufaktur yang luas dari negara anggota.

Negara-negara Plus Tiga memiliki posisi yang tidak dapat dipisahkan dalam industri otomotif dan pasar global. Korea dan Tiongkok menonjol sebagai produsen baterai terkemuka, sementara Jepang dan Korea adalah pemain utama dalam industri otomotif. Tiongkok, di sisi lain, mendominasi produksi dan pengolahan

mineral kritis serta mencatatkan jumlah kendaraan listrik terbanyak secara global. Kedua negara ini, terutama Tiongkok, memiliki inisiatif Belt and Road yang penting dalam pendanaan berbagai infrastruktur secara global. Investasi langsung asing (FDI) dari Tiongkok di ASEAN meningkat tajam, terutama dalam aktivitas terkait kendaraan listrik. Dengan melihat tren investasi yang ada, Jepang lebih berfokus pada produksi kendaraan listrik hibrida, sementara Korea berfokus pada kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) dan produksi baterai. Selain itu, Tiongkok juga memfokuskan perhatian pada investasi pengolahan dan ekstraksi mineral. Perbedaan ini menunjukkan adanya potensi besar untuk kolaborasi dan sinergi antara negara-negara anggota ASEAN Plus Three. Dengan kekuatan masing-masing, mereka dapat menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama untuk mengurangi emisi dan beralih ke energi terbarukan.

Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya akan memperkuat posisinya sebagai pemimpin ASEAN melalui tindakan ini, tetapi juga akan menunjukkan komitmennya untuk menangani masalah global seperti transisi energi dan perubahan iklim. Dengan dukungan mitra internasional dan penguatan kerjasama regional, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dalam pengembangan kendaraan listrik dan industri hijau di Asia Tenggara.

